



Penerapan Aplikasi SIPANSE dalam Pengelolaan Arsip di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu

¹Tri Windari, ²Marwan Arwani, ³Fransiska Timoria Samosir*

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

ABSTRACT

Development of information technology may change management system. The objective of this study was to reveal the implementation of SIPANSE application in archive management at Regional Office of Investment and One Door Integrated Service (DPMPTSP) of Bengkulu province, using descriptive qualitative method. Data collection technique used here were observation, interview, and documentation. The results were: (1) Infrastructure data in archive management process was merely data checking. (2) Legal infrastructure that was in the regional office using the regulation of Bengkulu's governor. (3) Institutional infrastructure was done by coordinating with other institutions such as BSSN and BSN. (4) Human infrastructure who worked with the application consisted of 3 Front Offices, 12 Back Offices, 6 Head of Sections, 1 Head of Division, and 1 Archivist. (5) Technology infrastructure consisted of building, computer devices, internet network, server. (6) Leader's thought strategy is carried out by optimizing so that the application can run.

INTISARI

Berkembangnya teknologi informasi dapat merubah sistem pengelolaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan aplikasi SIPANSE dalam pengelolaan arsip di DPMPTSP Provinsi Bengkulu, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini: 1) data infrastruktur dalam proses pengelolaan arsip hanya sebatas pengecekan data. 2) Infrastruktur legal yang ada di dinas menggunakan peraturan Gubernur Bengkulu. 3) Infrastruktur institusional yang dilakukan dengan koordinasi dari pihak luar seperti BSSN dan BSN. 4) Infrastruktur manusia yang bekerja dengan aplikasi terdiri dari 3 orang Front Offices, 12 orang Back Offices, 6 orang Kepala Seksi, 1 Kepala Bidang, 1 Arsiparis. 5) Infrastruktur teknologi terdiri dari gedung, perangkat komputer, jaringan internet, server. 6) Strategi pemikiran pemimpin yang dilakukan dengan mengoptimalkan agar aplikasi tersebut dapat berjalan

Submitted: 10/3/2022
Received: 8/1/2023



***Correspondence:**
Fransiska Timoria Samosir
ftsamosir@unib.ac.id

KEYWORDS:

SIPANSE application
archive
DPMPTSP
archive management
process

KATA KUNCI:

aplikasi SIPANSE
arsip
DPMPTSP
pengelolaan arsip

CITE THIS ARTICLE:

Windarl, T., Arwani, M., & Samosir, F. T. (2021). Penerapan Aplikasi SIPANSE dalam Pengelolaan Arsip di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu. *Jurnal Diplomatika*, 5(1), 26-33. <http://dx.doi.org/10.22146/diplomatika.73487>

PENDAHULUAN

Di era globalisasi teknologi informasi semakin berkembang dimana kita semua dituntut untuk berfikir cepat dan cermat karena banyaknya kalangan dalam mencari alternatif pemecahan suatu masalah pada bidang sistem teknologi informasi pengelolaan data. Kegiatan yang biasa dilakukan pada suatu dinas atau instansi perusahaan salah satunya dalam proses perizinan. Pada kegiatan perizinan tersebut, masyarakat akan mengumpulkan berkas persyaratan yang akan diserahkan kepada dinas yang dituju untuk diolah kembali. Berkas-berkas tersebut akan diolah sebagai arsip. Perubahan cara kerja pengelolaan arsip yang awalnya manual kemudian berubah dengan menggunakan sistem komputerisasi.

Ketika memberikan pelayanan publik maka instansi pemerintah maupun swasta diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya. Hal ini akan menjadi sebuah dorongan dalam pelaksanaan suatu penerapan *electronic government*, yaitu sebagai suatu sistem pelayanan yang berbasis teknologi atau elektronik, yang mana memanfaatkan suatu teknologi informasi yang ada di instansi pemerintahan tersebut. Pengembangan dan juga pemanfaatan akan adanya *e-government* tersebut merupakan suatu upaya yang dapat mendukung penyelenggara suatu kinerja di pemerintahan yang telah berbasis elektronik dan meningkatkan kinerjanya secara efektif dan juga efisien. *Electronic Government* sendiri merupakan suatu bentuk penerapan yang dilakukan pada suatu pelayanan untuk publik yang berbasis sebuah teknologi dan informasi, yang nantinya digunakan sebagai media informasi dan juga sebuah sarana komunikasi yang interaktif antara pemerintah dengan pihak lainnya seperti masyarakat, mitra kerja, dan antar lembaga pemerintahan (Maharani et al., 2016). Sementara menurut Dewandaru (2013) *E-Government* merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris dengan sebutan *Electronic Government* dengan sebutan singkatnya yaitu e-gov. *E-Gov* memiliki arti sebagai sistem pemerintahan secara elektronik, yang biasanya diterapkan pada suatu instansi atau lembaga terkait yang ingin memajukan sistem pelayanannya menjadi lebih canggih, salah satunya menggunakan suatu website atau sebuah aplikasi.

Teknologi informasi sangat penting di dunia arsip, baik dalam kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan sebagainya. Menurut Khodijah (2018) Arsip merupakan informasi yang terekam, kemudian didahului oleh sebuah peristiwa, yang mana peristiwa tersebut diwakili dalam bentuk simbol. Sulistyono-Basuki (dalam Hendrawan & Ulum, 2017) menjelaskan bahwa dalam segi fungsi, arsip sendiri terbagi atas dua fungsi antara lain arsip statis dan yang kedua arsip dinamis. Menurut Arsip merupakan hal yang paling penting, utama dan mendasar yang perlu diperhatikan dalam segala jenis kegiatan administrasi dan manajemen dalam suatu organisasi, dikarenakan arsip merupakan data informasi yang tersimpan mengenai segala hal yang kita kerjakan dalam rutinitas harian. (Irawan & Simargolang, 2018). Salah satu *software* yang digunakan disalah satu instansi pemerintah dalam proses kegiatan pekerjaan yaitu Sistem Perizinan dan Pelayanan Secara Elektronik (SIPANSE), yang dibuat dan diolah oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu. Aplikasi SIPANSE diluncurkan pada tahun 2017 dimana aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam proses membuat surat perizinan tanpa harus mendatangi langsung ke DPMPTSP. Aplikasi ini juga bermanfaat untuk seluruh staf yang bekerja di DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam proses kegiatannya. Aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat waktu serta tenaga terutama dalam pembuatan surat permohonan.

Namun kendala yang dihadapi adanya masyarakat yang masih datang langsung mengurus perizinan dan belum memanfaatkan aplikasi SIPANSE. Dinas PMPTSP telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aplikasi SIPANSE untuk

memudahkan pengguna dalam mengurus surat perizinan. Untuk itu perlu diketahui bagaimana penerapan yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP dalam menggunakan aplikasi SIPANSE dalam kegiatan di DPMPTSP. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk melihat penerapan aplikasi SIPANSE dalam pengelolaan arsip di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.

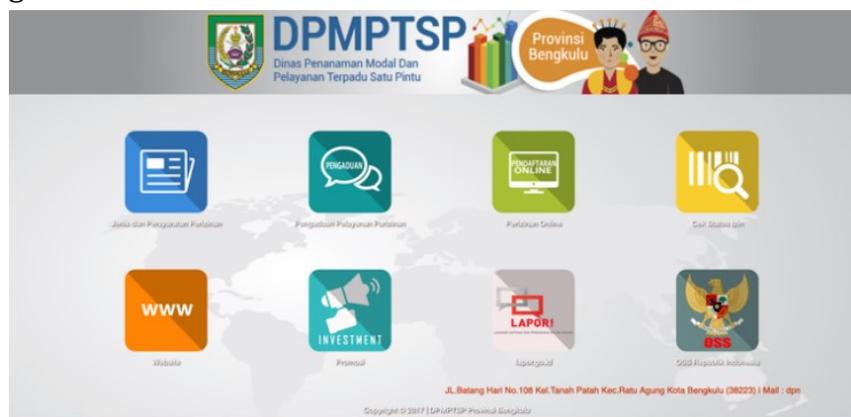
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugyono (2014) penelitian kualitatif ialah penelitian yang berlandaskan dengan suatu filsafat *postpositivisme* yang digunakan dengan tujuan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Yang mana peneliti adalah instrument kunci, sedangkan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan triangulasi (gabungan), kemudian analisis data yang digunakan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna, dalam kegiatan pengumpulan data peneliti juga menggunakan indikator-indikator dari *e-government* untuk menjawab dari permasalahan yang terjadi. Indikator tersebut terdiri dari 6 buah indikator, yang pertama data infrastruktur, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastruktur teknologi dan yang terakhir adalah strategi pemikiran pemimpin.

Subjek yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan cara menggali informasi melalui pihak yang mengerti akan latar belakang, kemudian visi misi hingga tujuan akan sejarah terbentuknya aplikasi SIPANSE, sehingga nantinya akan memperoleh hasil relevan yang dapat dipertanggung jawabkan. Objek penelitian ini adalah mengamati secara mendalam akan aktifitas orang-orang atau staf yang menggunakan aplikasi SIPANSE yang telah digunakan oleh DPMPTSP dalam kegiatan surat-menyurat atau pengelolaan arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi merupakan program pemecah masalah yang mempergunakan salah satu teknik pemrosesan sebuah data yang biasanya terpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan dalam pemrosesan sebuah data yang diharapkan (Juansyah, 2015). Aplikasi SIPANSE merupakan pemerintah elektronik (*e-government*) yang diciptakan untuk membantu dalam proses perizinan yang merupakan pendaftaran perizinan *online* dengan jaringan internet.



Gambar 1: Gambar Aplikasi SIPANSE
Sumber: Website DPMPTSP Provinsi Bengkulu

The image shows a web interface for the DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) of Bengkulu Province. The main heading is "Pendaftaran Pemohon Online" (Online Applicant Registration). Below the heading, there are navigation tabs: "Cek Status Izin", "Pengajuan Online", "Jenis Perizinan", "SOP Perizinan", "Pendaftaran Online", "Regulasi", and "Login". The main content area contains a form with the following fields:

- Jenis Pemohon:** Radio buttons for "Perorangan" (selected) and "Perusahaan".
- Nama Pemohon:** Text input field.
- Nama Pemegang Kuasa:** Text input field with a "*Mohon Diisi" note.
- No HP Pemohon:** Text input field.
- No HP Pemegang Kuasa:** Text input field with a "*Mohon Diisi" note.
- E-mail Pemohon:** Text input field.
- Alamat Pemohon:** A section with dropdown menus for "Provinsi" (PROVINSI D.K.I. JAKARTA), "Kabupaten / Kota", "Kecamatan", and "Kelurahan / Desa", followed by a text input field for "Alamat".

Gambar 2. Fitur Perizinan Online
 Sumber: Website DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Aplikasi SIPANSE ini bertujuan untuk membantu masyarakat Bengkulu dalam mengurus perizinan secara *online* dimana penyampaian konfirmasi data melalui konfirmasi sms dan email pemohon. Aplikasi ini juga mengurangi penggunaan kertas dalam proses perizinan sehingga pemohon tidak perlu membawa berkas dalam bentuk kertas ketika hendak mengurus perizinan. Selain itu bagi staf pengelola juga dapat menghemat waktu dalam hal penciptaan surat perizinan hingga dalam kegiatan pengelolaan arsip.

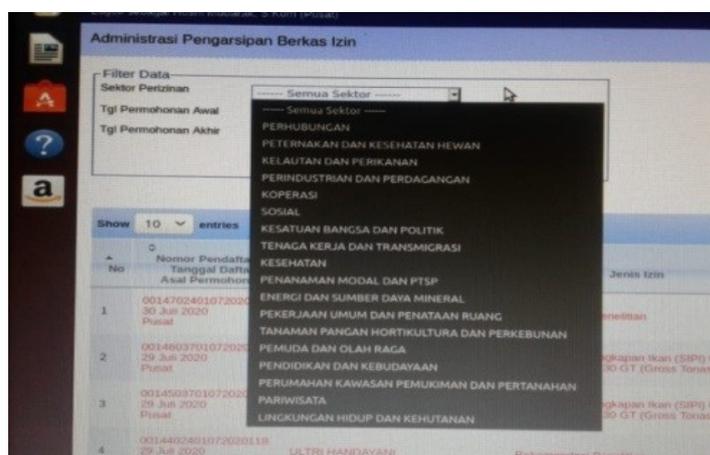
Menurut Mahendra (2014) bahwa dalam menerapkan pemerintahan elektronik atau disebut sebagai *e-gov*, yang mana *e-gov* memiliki enam indikator yang berkaitan untuk mendukung kegiatan penerapan. Enam indikator tersebut yaitu : Data infrastruktur, Infrastruktur legal, Infrastruktur institusional, Infrastruktur manusia, Infrastruktur teknologi, strategi pemikiran pemimpin.

Data Infrastruktur

Data infrastruktur merupakan indikator pertama yang menggambarkan bagaimana kesiapan infrastruktur yang telah ada demi mendukung penerapan sistem yang digunakan, kesiapan infrastruktur tersebut dapat dilihat melalui manajemen sistem yang telah diterapkan, dokumentasi dan juga proses kerja yang dilakukan pada lembaga pemerintahan untuk melihat bagaimana kesiapan untuk menyediakan kualitas atau kuantitas yang mendukung penerapan *E-Government*.

Manajemen sistem yang dilakukan oleh di DPMPTSP terkait adanya aplikasi SIPANSE itu berawal dari masyarakat/pemohon yang mengirim berkas serta ajuannya untuk dibuatkan surat perizinan, dengan memanfaatkan aplikasi maka permohonan dari pemohon akan segera diproses oleh bagian *Back Office*, KASI, KABID kemudian setelah surat telah jadi, maka akan dikirim melalui *email* pemohon. Setelah itu berkas persyaratan yang dikirim masyarakat serta surat perizinan yang telah jadi akan otomatis masuk ke dalam penyimpanan aplikasi SIPANSE menjadi sebuah arsip, akan tetapi bagi pemohon yang belum mengerti dalam menggunakan aplikasi SIPANSE dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor dengan mendaftarkan diri pada bagian *Front Office* yang merupakan tempat admistrasinya dengan membawa berkas persyaratan yang diminta oleh dinas. Proses mengarsipkan data pemohon ke dalam aplikasi SIPANSE dimana arsiparis membutuhkan waktu yang lumayan lama, dikarenakan arsiparis harus mengecek setiap identitas yang dimasukkan *Front Office* dan *Back Office* secara satu-satu dengan memiliki persyaratan yang berbeda-beda.

Kemudian meskipun adanya aplikasi SIPANSE akan tetapi pengarsipan data yang dilakukan hanya sebatas pengecekan apakah data yang diberikan ada atau tidak, kemudian data akan disimpan ke aplikasi dengan menentukan tahun, jumlah, sampel, box, rak pada saat pemasukan ke dalam arsip.



Gambar 2. Gambar menu sektor perizinan.

Sumber: DPMPTSP Prov Bengkulu

Gambar di atas merupakan menu dari website *back office* administrasi pengarsipan berkas izin SIPANSE dimana staff akan memasukkan data-data dari sipemohon perizinan. Pada proses pengiputan setiap data dimasukkan kedalam kelompok jenis perizinan seperti koperasi, Kesehatan, perhubungan dan lain-lain.

Infrastruktur Legal

Infrastruktur legal adalah salah satu indikator yang berpengaruh terhadap penerapan *E-Government* yang berada di instansi pemerintah, dikarenakan infrastruktur legal membahas mengenai landasan hukum atau peraturan undang-undang yang digunakan instansi pemerintah untuk mendukung berjalannya penerapan aplikasi agar dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan.

Landasan digunakan oleh DPMPTSP dalam menjalankan penerapan aplikasi SIPANSE adalah peraturan Gubernur yaitu peraturan yang mendorong untuk menyegerakan akan penerapan aplikasi SIPANSE tertuang dalam peraturan gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan *Electronic Government* pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan peraturan gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2018 tentang *Master Plan E-Government* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Seperti yang telah diketahui *E-Government* merupakan elektronik pemerintahan di DPMPTSP dalam penerapan sistem elektroniknya menggunakan sistem yang diberi nama SIPANSE.

Infrastruktur Institusional

Infrastruktur institusional merupakan suatu intitusi pemerintah atau kepala secara sadar memfokuskan diri untuk meningkatkan peran pentingnya terhadap penerapan aplikasi yang digunakan, baik dalam bentuk kerjasama yang dilakukan antar lembaga dan sistem pembagian kerja yang diberikan pimpinan pada saat menerapkan aplikasi SIPANSE.

Peran yang dilakukan oleh kepala dinas dan kepala aplikasi sangatlah penting. Kepala dinas memiliki peran utama dalam meningkatkan kualitas akan adanya aplikasi SIPANSE, karena kepala dinas yang memiliki wewenang akan berlangsungnya aplikasi SIPANSE agar terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta peran kepala

aplikasi sebagai penentu agar aplikasi tersebut berjalan terus-menerus tanpa hambatan. Peran kepala aplikasi SIPANSE adalah *update* terus-menerus agar meminimalisir hambatan yang tidak diinginkan selama memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam proses kerja yang dilakukan oleh staf pengelola. Sistem kerja sama yang dilakukan pihak DPMPTSP bekerja sama dengan tim teknis. Pihak dinas dalam penerapan aplikasi SIPANSE bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan BSE (Balai Sertifikasi Elektronik) untuk memperkuat dalam penerapan aplikasi SIPANSE agar lebih aman, mencegah pemalsuan surat perizinan dan dalam proses pembuatan tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik disistem aplikasi SIPANSE.

Infrastruktur Manusia

Infrastruktur manusia merupakan salah satu indikator terpenting untuk melihat keberhasilan pada suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, keberhasilan yang dimaksud itu tergantung dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi tersebut. Seperti halnya dalam proses penerapan *E-Government*, maka suatu instansi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi demi mendukung tercapainya tujuan dalam penerapan pemerintahan yang elektronik.

Staf yang dalam proses kerjanya menggunakan aplikasi adalah *Front Office* yaitu 3 staf, *Back Office*:12 staf, KASI: 6 staf, KABID: 1 orang, ARSIPARIS: 1 orang. Tahap yang dilakukan oleh kepala Aplikasi SIPANSE terhadap staf yang bekerja menggunakan aplikasi adalah dengan cara melakukan pelatihan, karena memang semua staf yang bekerja baik itu pada bagian *Front Office*, *Back Office*, hingga arsiparis tidak memiliki latar belakang mengenai teknologi, bahkan pada bagian arsip staf yang melakukan pengelolaan bukan lulusan dari ilmu kearsipan, akan tetapi dari ekonomi manajemen, sehingga pada saat mereka ditempatkan pada bagiannya masing-masing telah dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Sehingga masih ditemukan hambatan pada saat pekerjaannya, selain itu karena kekurangan SDM membuat staf memiliki tugas ganda yaitu pada bagian pengarsipan yang hanya terdiri dari 1 staf dengan latar belakang bukan arsip tetapi juga ditempatkan pada bagian keuangan.

Dalam rangka kegiatan pengelolaan arsip dan untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang kearsipan maka perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk tata kelola seluruh arsip (Octafiona et al., 2020)

Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur Teknologi merupakan salah satu indikator yang memiliki peran penting dalam penerapan *E-Government*, karena sebelum pada saat pembentukan pemerintahan elektronik bertumpu pada infrastruktur teknologi yang disediakan untuk mendukung kegiatan penerapan *E-Government*. Hal ini seperti yang dalam penelitian (Irawan & Simargolang, 2018) bahwa teknologi yang digunakan ini dapat melayani sebuah keragaman yang berbeda yaitu pemberian pelayanan pada warga negara yang lebih baik, meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses terhadap informasi, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Tidak terlepas pula pada bidang kearsipan yang harus mampu membentuk budaya kerja pengarsipan secara digital dengan pemanfaatan teknologi (Prasetyo & Bramantya, 2020).

Peningkatan kinerja DPMPTSP juga didukung dengan penyediaan *system server* yang ditempatkan dalam suatu Gedung yang menjadi sarana pendukung dalam penerapan aplikasi SIPANSE. DPMPTSP juga menyediakan perangkat komputer untuk seluruh staf yang bekerja menggunakan aplikasi SIPANSE dan 2 perangkat komputer

yang dapat digunakan masyarakat apabila ingin belajar mengenai aplikasi SIPANSE yang dapat didampingi oleh salah satu staf disana.

Strategi Pemikiran Pemimpin

Strategi pemikiran pemimpin merupakan indikator yang nantinya dapat menjelaskan bagaimana peran yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kegiatan penerapan aplikasi *E-Government*, dikarenakan pada saat pelaksanaan suatu sistem aplikasi, pasti nantinya akan membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki pola pikir mengenai visi dan misinya untuk meningkatkan penerapan pemerintahan elektronik.

Strategi pemimpin terhadap penerapan aplikasi SIPANSE memiliki rencana atau visi dan misi untuk kedepannya dapat mengoptimalkan agar aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, Strategi pemikiran pemimpin adalah apabila pada saat proses kerja terdapat suatu hambatan atau kendala maka dilakukan dengan cara mengklasifikasikan terlebih dahulu, seperti halnya apabila kendala tersebut mengenai sarana maka dari pihak dinas akan mengesampingkan dulu karena terkait dengan dana sedangkan dana yang sekarang belum mencukupi untuk menambah sarana yang ada. Apabila kendala tersebut mengenai SDM maka DPMPTSP akan menambahnya lagi, adapun SDM yang tidak memiliki latar belakang mengenai TI maka akan kami atasi dengan cara memberikan pelatihan. Pada kendala system aplikasi, maka Dinas akan *update* atau memperbaharui terus-menerus agar terhindar dari virus atau *hacker*. Pada dari luar seperti pemohon yang membutuhkan bimbingan online pada saat memasukkan data maka Dinas menyediakan Nomor HP dari salah satu petugas yang akan siap membimbing pemohon tersebut.

KESIMPULAN

Basarkan hasil penelitian dan juga pembahasan mengenai penerapan aplikasi SIPANSE dalam pengelolaan arsip di DPMPTSP Provinsi Bengkulu, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa penerapan *electronic government* yang belum diterapkan maksimal dalam pengelolaan arsip di SIPANSE. belum diterapkan maksimal dalam pengelolaan arsip di SIPANSE. Hal ini dapat dilihat dari penerapan yang dilakukan oleh staf pengarsipan pada dua web yang berbeda. Kedua website tersebut menyatu dengan alat server yang ada. Perbedaan prosedur tersebut berpengaruh terhadap peran staf pengarsipan melakukan pekerjaannya. Apabila pemohon mengajukan surat permohonan izin dengan mengikuti prosedur di website, maka kegiatan pengarsipan menggunakan aplikasi tidak akan dilakukan oleh staf pengarsipan. Sedangkan apabila pemohon mengajukan surat permohonan secara langsung ke kantor dinas, maka kegiatan pengelolaan arsip dilakukan oleh staf pengarsipan yang tidak memiliki latar belakang tentang kearsipan. Pada saat staf pengarsipan melakukan proses pengarsipan menggunakan aplikasi SIPANSE hanya dilakukan dengan cara pengecekan data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penelitian ini yaitu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

Dewandaru, S. D. (2013). Pemanfaatan Aplikasi E-Office untuk Mendukung Penerapan E-Government dalam Kegiatan Perkantoran Studi Kasus: Puslitbang Jalan dan Jembatan. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi* , 232–239. <https://adoc.pub/pemanfaatan-aplikasi-e-office-untuk-mendukung-penerapan-e>

[-go.html](#)

- Hendrawan, M. R., & Ulum, M. C. (2017). *Pengantar Kearsipan : Dari Isu Kebijakan ke Manajemen*. UB Press.
- Irawan, M. D., & Simargolang, S. A. (2018). Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika. *(JurTI) Jurnal Teknologi Informasi*, 2(1), 67–84. <https://doi.org/10.36294/JURTL.V2I1.411>
- Juansyah, A. (2015). Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted-Global Positioning System (A-Gps) Dengan Platform Android. *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA)*, 1(1), 1–8. <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/673/jbptunikompp-gdl-andijuansy-33648-11-20.unik-a.pdf>
- Khodijah, K. (2018). Peran Arsiparis Dalam Mengelola Arsip Sebagai Sumber Informasi. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(2), 180–190. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/1857>
- Maharani, R. T., Fanida, E. H., Ap, S., & Ap, M. (2016). Penerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 4(54). <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V4N10.P>
- Mahendra, G. K. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis E-Government. *Jurnal Ilmu Pemerintah & Kebijakan Publik*.
- Octafiona, E., el-Khaeri Kesuma, M., & Bashori, A. (2020). Kesiapan Arsiparis Menggunakan E-Arsip Dalam Tata Kelola Kearsipan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Intan Lampung. *El Pustaka: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 01(01), 86–99. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/elpustaka/article/view/6744/3831>
- Prasetyo, A., & Bramantya, A. R. (2020). Peran Sistem Informasi Manajemen Kearsipan: Studi Kasus Kementerian Sekretariat Negara RI. *Jurnal Diplomatika*, 3(2), 74–85. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.58476>
- Sugyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.